



**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**Skripsi**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Nina Ari Santi**

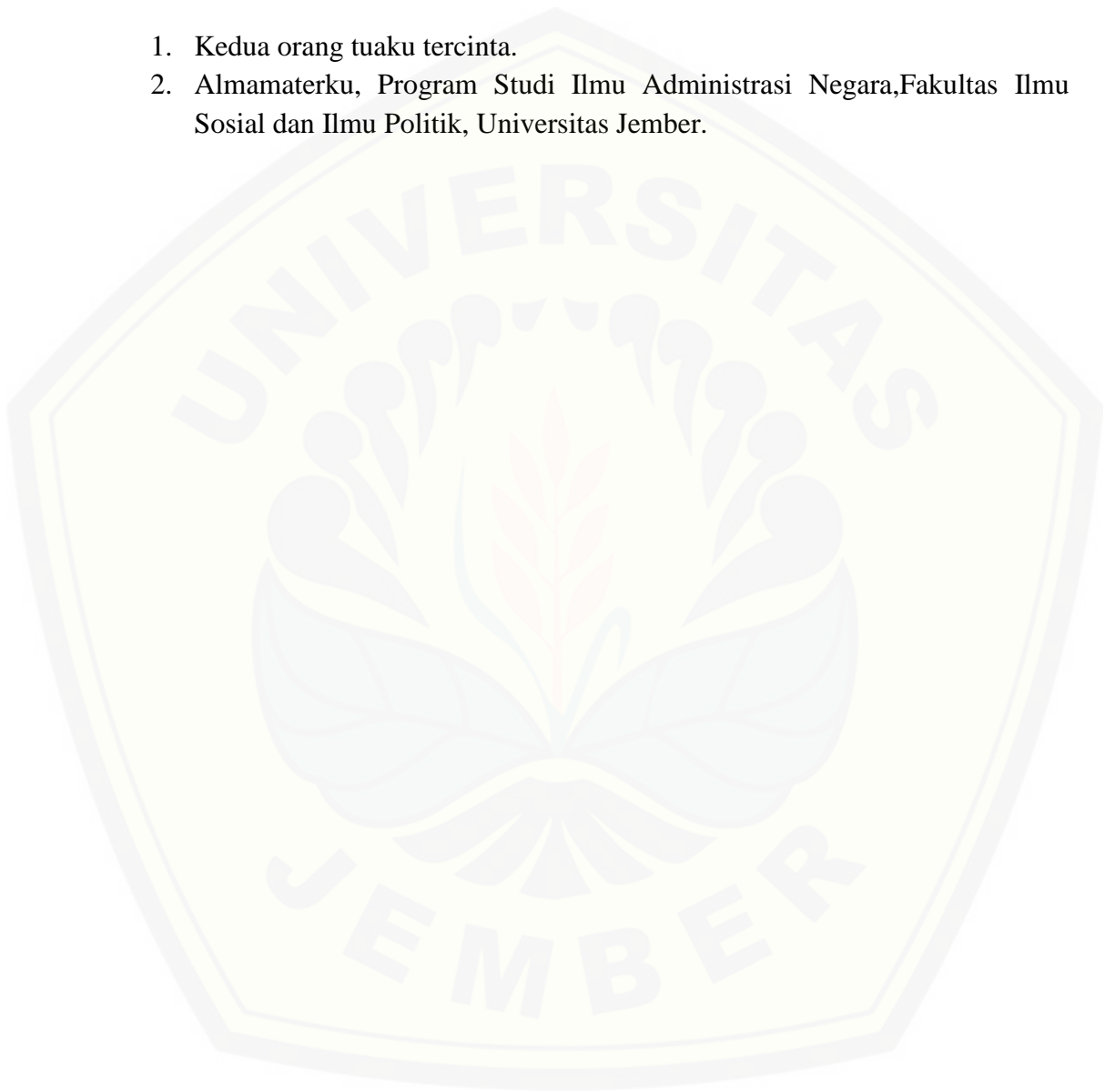
**140910201010**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta.
2. Almamaterku, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



**MOTTO**

“ sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan”

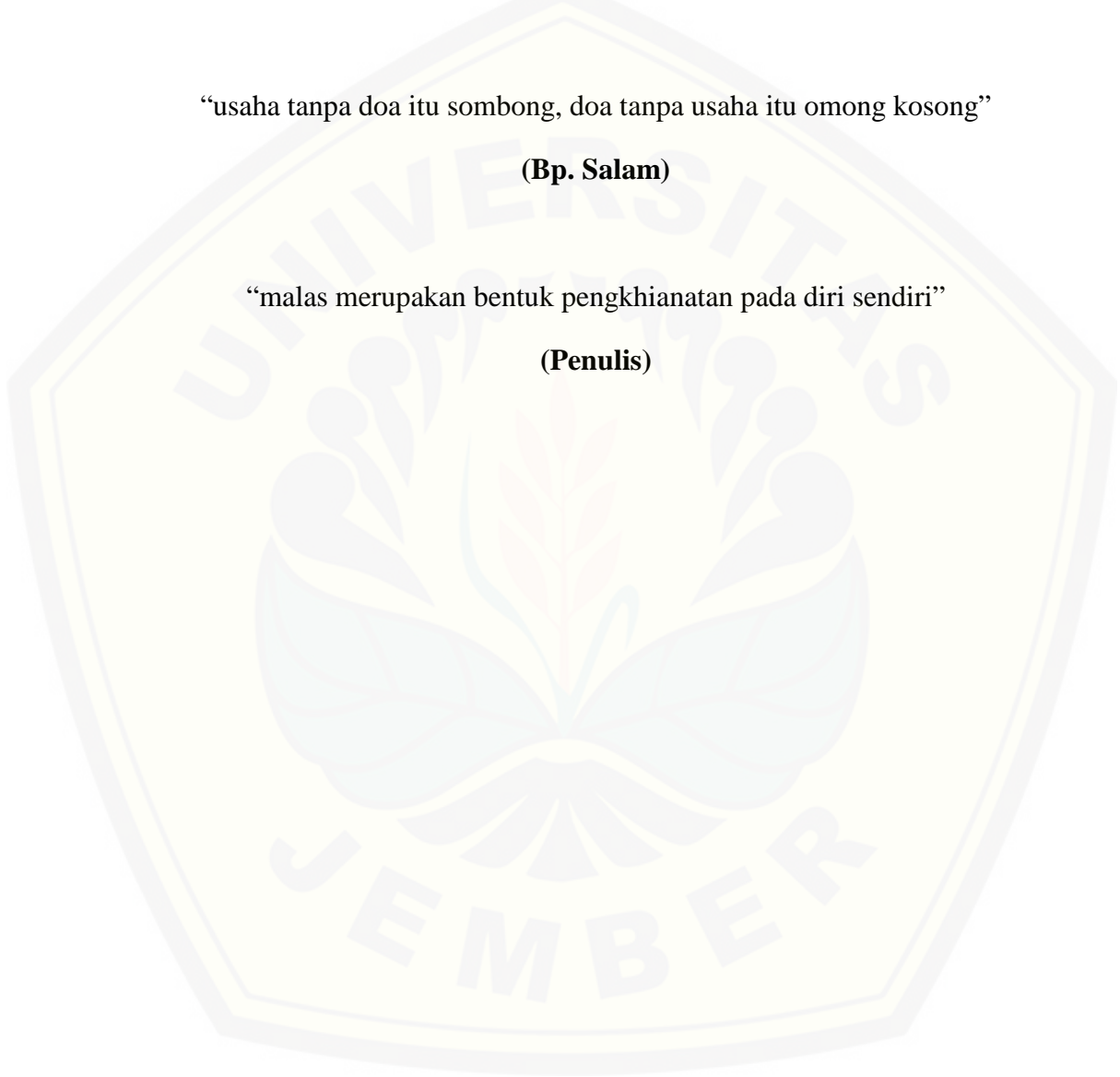
**(QS. Alam Nasyroh: 6)**

“usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu omong kosong”

**(Bp. Salam)**

“malas merupakan bentuk pengkhianatan pada diri sendiri”

**(Penulis)**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

nama : Nina Ari Santi

NIM : 140910201010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013-2017” adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2018  
Yang menyatakan,

Nina Ari Santi  
140910201010

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember” karya NinaAri Santi telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 9 Juli 2018  
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
waktu : 15.00 WIB

Tim Penguji:

Ketua

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP  
NIP 197410072000121001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Drs. Supranoto, M.Si  
NIP 196102131988021001

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 195607261989021001

Anggota

Abul Haris Suryo, S.IP, M.Si  
NIP 198210292015041001

Mengesahkan  
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Oleh  
Nina Ari Santi  
140910201010

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si

## RINGKASAN

**Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah;** Nina Ari Santi, 140910201010; 86 halaman; Program Studi Administrasi Negara Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2013-2017. Terkait dengan pentingnya pendapatan sebagai penerimaan sebuah negara. Pendapatan digunakan sumber pembiayaan setiap kegiatan pemerintahan dan juga memenuhi kebutuhan rakyat. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri dalam hal politik pemerintahan juga hal keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kewenangan ini di sahkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kewenangan ini yang kemudian disebut sebagai Otonomi Daerah dan daerah yang melaksanakannya disebut Daerah Otonom.

Pendapatan Daerah penting bagi segala kegiatan sebagai pembiayaan, sebab adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah harus mampu menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya. Pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang kini bisa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata ini yang akan membantu menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.

Sektor pariwisata berkontribusi pada sebuah daerah untuk mendapatkan pendapatan, lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Jember antara lain yang termasuk Pendapatan Asli Daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi selama 5 tahun, pada tahun 2013 berkontribusi sebesar 3,79%, pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan berkontribusi sebesar 3,30%, pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan berkontribusi sebesar 3,34%, pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan berkontribusi sebesar 3,42%, pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan berkontribusi sebesar 2,89%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,79%, dan paling kecil di tahun 2017 sebesar 2,89%.

Pajak restoran merupakan subsektor yang berkontribusi paling besar daripada subsektor lainnya yakni mencapai rata-rata lebih dari 50%, serta mencapai kontribusi paling besar daripada subsektor yang lain pada tahun 2017 sebesar 58,32%. Kontribusi terkecil adalah subsektor retribusi tempat khusus parkir yang tidak mencapai 1% selama 5 tahun dan cenderung mengalami penurunan selama 5 tahun, serta berkontribusi paling kecil diantara subsektor yang lain yakni hanya 0,49% di tahun 2017. Urutan kontribusi subsektor pariwisata antara lain 1) Pajak Restoran, 2) Pajak Hotel, 3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 4) Pajak Hiburan, 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan, 6) Retribusi Tempat Khusus Parkir.



## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2017”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
3. Dr.AkhmadToha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Dr. Sutomo, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
6. Drs. Supranoto, M.Si selaku dosen pembimbing utama dan Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah membimbing saya dengan baik dan sabar;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maupun Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
8. Ibu Sukini yang senantiasa memberi dukungan dan doanya;
9. Ibu Sukinem dan Bp. Imam Muslih yang telah mendidik saya hingga dewasa;
10. Saudara-saudari saya Yuni Nurfitroh, Fajar Sujianto, Wahyu Tri Sakti, Aji Wiono, dan Rani Diah Astuti yang selalu memberi dukungan dan doa.

11. Ibu Djaki Urip yang merawat saya di Jember seperti anaknya;
12. Bapak kedua saya Bp. Salam yang telah mendoakan dan menganggap saya sebagai putrinya;
13. Saudari temu gede saya Ajenk Kristina Anggraini yang saling memotivasi satu sama lain;
14. Teman-teman seperjuangan dari Rusunawi Buu, Yaya, Jemb, Paud, dan Anne;
15. Teman-teman kontrakan saya Rina, Icha, Yuli, Sopin, dan Ayuk;
16. Teman-teman yang membantu saya menuju kedewasaan Ukhti Lupi, Laras Thung, Noug.
17. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2014. Terima kasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini;
18. Seluruhteman-teman KKN UMD 55 yang selalumemberikanmotivasidandukunganselamaini;
19. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang kubanggakan;
20. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan membantu dalam dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepada semua pihak yang membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, semua kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih yang berharga bagi khasanah keilmuan di bidang Administrasi Pemerintahan Daerah.

Jember, 4 Juni 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>12</b>
2.1.1 Otonomi Daerah.....	<b>13</b>
2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah.....	<b>15</b>
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	<b>19</b>
2.1.4 Kepariwisataaan.....	<b>23</b>
2.1.5 Kontribusi Sektor Pariwisata.....	<b>28</b>
<b>2.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>29</b>
<b>2.3 Kerangka Berpikir</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
<b>3.1 Metode Penelitian</b> .....	<b>32</b>

<b>3.2 Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>32</b>
<b>3.3 Tempat dan Waktu Penelitian</b> .....	<b>33</b>
<b>3.4 Data dan Sumber Data</b> .....	<b>34</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>35</b>
<b>3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data</b> .....	<b>36</b>
3.6.1 Analisis Time Series .....	36
3.6.2 Analisis Proporsi .....	36
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember</b> .....	<b>38</b>
4.1.1 Kondisi Geografis .....	38
4.1.2 Kondisi Topografis .....	39
4.1.3 Wilayah Administrasi .....	39
4.1.4 Kondisi Demografi .....	39
4.1.5 Kondisi Ekonomi .....	44
4.1.6 Sektor Pariwisata di Kabupaten Jember .....	46
<b>4.2 Hasil</b> .....	<b>46</b>
4.2.1 Analisis <i>Time Series</i> .....	48
4.2.2 Analisis Proporsi .....	51
<b>4.3 Pembahasan</b> .....	<b>57</b>
4.3.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember .....	58
4.3.2 Perbandingan Penerimaan Sektor Pariwisata dengan Penerimaan PAD lainnya .....	60
4.3.3 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD .....	65
4.3.4 Kontribusi Subsektor Pariwisata terhadap Sektor Pariwisata .....	79
4.3.5 Perbandingan Kontribusi Setiap Subsektor .....	80
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	<b>80</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>80</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>84</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Pengunjung Wisatawan Jember.....	6
1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2013-2017 .....	9
4.1 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/ Desa.....	40
4.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember 2012-2016.....	42
4.3 Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2012-2016 .....	43
4.4 Data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Jember tahun 2013-2017.....	46
4.5 Perbandingan Penerimaan Sektor Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya tahun 2013-2017 .....	46
4.6 Jumlah Hotel, Restoran, Tempat Hiburan di Kabupaten Jember tahun 2013-2017 .....	47
4.7 Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2012-2016.....	47
4.8 Pertumbuhan Penerimaan Sektor Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya tahun 2013-2017 .....	51
4.9 Perbandingan Kontribusi sektor pariwisata dengan pendapatan lain terhadap PAD tahun 2013-2017.....	52
4.10 Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.....	52
4.11 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Setiap Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.....	53
4.12 Kontribusi Sektor Pariwisata di Setiap Sumber Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.....	53
4.13 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pariwisata.....	54

4.14 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pariwisata.....	54
4.15 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pariwisata.....	55
4.16 Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Pariwisata.....	55
4.17 Kontribusi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan terhadap Pariwisata.....	56
4.18 Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terhadap Pariwisata.....	56
4.19 Perbandingan Setiap Subsektor Pariwisata tahun 2013-2017.....	57
4.19 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jember tahun 2013-2017.....	57

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Peta Kabupaten Jember .....	38
4.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Jember Tahun 2010-2016 .....	44
4.3 Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2013-2014 .....	48
4.4 Grafik Perkembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Jember tahun 2013-2014 .....	48
4.5 Grafik Perkembangan Subsektor Pariwisata Kabupaten Jember tahun 2013-2014 .....	49
4.6 Grafik Penerimaan Sektor Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya tahun 2013-2017 .....	50



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Perda Kabupaten Jember No. 3 tentang Pajak Daerah (Potongan)
- Lampiran 3. Perda Kabupaten Jember No. 5 tentang Retribusi Jasa Usaha (Potongan)
- Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian dari Lemlit Unej
- Lampiran 6. Surat Rekomendasi Penelitian dari Bangkesbangpol Jember
- Lampiran 7. Daftar: Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2013-2017

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2013-2017. Terkait dengan pentingnya pendapatan sebagai penerimaan sebuah negara. Negara memiliki sebuah kewajiban untuk melayani kebutuhan dari rakyatnya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut dilakukan banyak kegiatan oleh pemerintah sebagai pelaksana kewajiban tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut barang tentu pasti membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan di zaman modern ini sering diartikan sebagai uang. Untuk mendapatkan uang ini negara dapat melakukan berbagai hal seperti mencetak uang sendiri atau meminjam keluar negeri, dan banyak jalan lain. Uang inilah yang akan disebut sebagai pendapatan.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri dalam hal politik pemerintahan juga hal keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kewenangan ini di sahkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kewenangan ini yang kemudian disebut sebagai Otonomi Daerah dan daerah yang melaksanakannya disebut Daerah Otonom. Menurut Mahmudi (2010) tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah yang semakin responsif terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta meningkatnya demokratisasi di daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan adalah semua penerimaan

Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Pentingnya pendapatan sebagai sumber pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Pendapatan daerah yang APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagian Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah (hibah). Pendapatan ini harus dapat dikelola dengan baik agar berdayaguna. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah, J. Wajong dengan mengutip pendapat D'Audifferet dalam Darwin (2010) antara lain :

1. bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada hari kemudian penduduk sederhana, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh untuk melakukan kegiatan dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu;
2. bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak memberikan hasil yang memuaskan dan abadi tanpa cara pengendalian keuangan yang baik terlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijaksanaan, yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah dengan mana semua kepentingan masyarakat daerah dengan sangat erat berhubungan;
3. bahwa anggaran adalah alat utama untuk pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang bijaksana.

Pendapatan Daerah penting bagi segala kegiatan sebagai pembiayaan, sebab adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah harus mampu menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya. Pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang kini bisa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam otonomi daerah, sumber pendapatan daerah yang sangat penting

adalah PAD daripada pendapatan lain, karena pendapatan ini bersifat tidak terikat dan dapat dipergunakan sesuai inisiatif dan prakarsa dari pemerintah daerah itu sendiri, sedangkan pendapatan lain luar PAD harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. PAD merupakan sumber pendapatan yang paling besar sebagai penopang APBD, dan juga pembiayaan pembangunan daerah yang wajib terus dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pentingnya bagi suatu daerah untuk meningkatkan PAD. Tujuan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (1) yaitu, “PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.”

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ayat 1 dan 2, PAD bersumber dari :

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain PAD yang sah, antara lain :
  - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Di Indonesia yang memiliki berbentuk negara kepulauan banyak sektor yang dapat dijadikan sumber pendapatan seperti sektor pertanian, pertambangan, kelautan, pariwisata, dan lain-lain. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keberagaman budaya, bahasa, suku, dan ras serta kekayaan dan keindahan alam yang melimpah. Indonesia dengan semboyannya “gemah ripah loh jinawi, toto tentrem katon raharjo” yang artinya kekayaan alam yang melimpah, keadaan yang tertata tentram terlihat sejahtera, seperti itulah Indonesia. Kekayaan dan keindahan alamnya serta budaya yang beraneka ragam

dari sabang sampai merauke. Keindahan alam Indonesia yang seringkali mampu menyihir mata-mata para manusia untuk menikmati serta budaya-budayanya yang menarik perhatian. Keindahan alam dan berbagai budaya yang menarik inilah yang akan dijadikan sebagai daya tarik wisata.

Setiap manusia di dunia ini selalu menyempatkan dirinya untuk melakukan wisata. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisata merupakan salah satu kebutuhan penting bagi rohani. Wisata pun dinikmati secara individu atau berkelompok seperti keluarga, teman, dan pasangan. Oleh karena itu, kebutuhan yang menjadi minat hampir seluruh manusia ini perlu pengelolaan menjadi sebuah peluang yang produktif bagi pemerintah. Kekayaan alam dan budaya tersebut jika dikelola dengan baik diharapkan mampu menunjang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 dalam menimbang sebagai berikut;

“bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pentingnya pengelolaan tempat wisata menjadi pariwisata karena menurut UU No. 10 Tahun 2009 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah memiliki peranan penting di dunia pariwisata sebagai penunjang fasilitas. Pariwisata yang dikelola dengan baik dengan berbagai fasilitas yang membuat nyaman dan aman para wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Kegiatan wisata ini dapat dikelola yang kemudian mampu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara.

Keberagaman kebudayaan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia berasal dari daerah-daerah yang berbeda, dalam pengelolaannya pemerintah pusat tidak akan mampu untuk mengelolanya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menciptakan hak bagi setiap daerah yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah atau otonomi merupakan perwujudan dari desentralisasi. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pengelolaan kekayaan alam dan budaya yang ada dalam sebuah daerah menjadi hak dan kewajiban sebuah Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi. Setiap daerah kemudian memiliki wewenang untuk mengelola pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia dan masuk dalam otonomi daerah dalam pengelolaannya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan pariwisata di Indonesia lebih di fokuskan karena memiliki banyak alasan antara lain :

1. semakin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa;
2. merosotnya nilai ekspor pada sektor non migas;
3. prospek pariwisata yang memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten;
4. besarnya potensi bagi pengembangan pariwisata Indonesia. (James Spillane, 1994)

Tertuang dalam pasal 3 UU No. 10 Tahun 2009, bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 4, kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;

- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia . Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan. Kabupaten Jember terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur (Sumber:<https://id.wikipedia.org>).

Menurut Badan Pusat Statistik Jember adalah kabupaten terluas nomor 3 di Jawa Timur yang masuk dalam Karesidenan Besuki. Jember sebagai salah satu kabupaten atau daerah di Indonesia kebudayaan dan keindahan alam yang banyak dan cukup menarik. Hal ini dibuktikan dengan didaptkannya Indonesia Attractive Award 2017 untuk eks Karesidenan Besuki dengan kategori kabupaten terbaik.(Sumber:<http://m.jatimtimes.com/baca/159178/20170927/205703/raih-attractive-award-jember-dan-banyuwangi-wakili-eks-karesidenan-besuki/>).

Tabel 1.1 Data Pengunjung Wisatawan Jember

Tahun	Lokal	Manca	Total
2012	740.615	1.682	742.297
2013	828.368	1.869	830.237
2014	917.528	2.672	920.200
2015	1.052.777	3.017	1.055.794
2016	1.299.482	2.751	1.302.233

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember diolah

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa total pengunjung wisatawan di Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga mempengaruhi PAD dari sektor Pariwisata. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dari PAD di Kabupaten Jember yakni sektor pariwisata, dikutip dari m.kbr.id Bupati Jember Ibu Hj. Faida menyampaikan:

“Ini dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dari sektor Pariwisata meningkat hingga 100%. Bahkan pada tahun 2012 silam, pendapatan aslinya dari pajak hotel dan restoran tercatat mencapai Rp 7 miliar. Ini menjadikan pariwisata menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Jember”.( Sumber: [http://m.kbr.id/berita/09-2017/saga\\_jember\\_kota\\_karnaval\\_indonesia/92365.html](http://m.kbr.id/berita/09-2017/saga_jember_kota_karnaval_indonesia/92365.html) )

Pada tahun sebelumnya kontribusi dari sektor pariwisata belum mencapai target, yang disampaikan Bupati Jember Ibu Hj. Faida dikutip dalam m.beritajatim.com pada 24 Juni 2016, “Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah saat ini hanya 3,3%. Di akhir RPJMD, targetnya 7,5%.”(sumber:[http://m.beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/269999/kantor\\_pariwisata\\_jember\\_jadi\\_bumd.html](http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/269999/kantor_pariwisata_jember_jadi_bumd.html))

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan daerah. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerjadalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat ndikatif. Sementara itu berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar. Sedangkan pada pasal 76 disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pengertian kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan. Menurut Kamus Ilmiah Populer, karya Dany (2006:264) ”Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.” Sementara menurut Kamus Umum



Bahasa Indonesia, karya Yandianto (2000:282) kontribusi diartikan "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan." Peneliti menyimpulkan kontribusi dalam penelitian ini merupakan sumbangan baik dalam bentuk materi maupun non-materi yang akan menjadi bagian dari suatu hal dan berdampak nyata dan positif. Peneliti mengartikan kontribusi dalam penelitian ini sebagai suatu bagian.

Sektor pariwisata di Kabupaten Jember yang termasuk dalam daftar Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember berdasarkan yang ada di dalam Buku Database Informasi Pariwisata Kabupaten Jember(2016) sebagai berikut.

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Menurut Umila, dkk (2001:13) bahwa dengan keberadaan sektor informal disuatu daerah wisata, maka akan tetap muncul pengunjung atau wisata yang berdatangan di wisata tersebut atau selama kepariwisataan masih tetap berkembang maka pedagang sektor informal akan berdatangan di kawasan wisata tersebut. Secara ekonomis, objek pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat dan juga berkontribusi dalam pendapatan pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Roerkaerts dan Savat (Spillane, 1987:138) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah sebagai berikut.

- a. Menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan, dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan.

- b. Membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan masa rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut.
- c. Menambah devisa negara, semakin banyaknya wisatawan yang datang, maka makin banyak devisa yang diperoleh.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	303.845.078.814,50	308.383.350.304,68	101,49%
2014	504.157.202.641,00	441.505.617.222,69	87,57%
2015	508.448.614.149,00	462.457.671.769,93	90,95%
2016	519.190.673.159,00	524.137.897.016,96	100,95%
2017	736.927.109.103,11	719.105.671.347,78	97,58%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diolah

Target yang ditetapkan terus mengalami peningkatan, diikuti dengan realisasinya, meskipun prosentase dari realisasi terhadap target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember terkadang masih belum mencapai targetnya. Akan tetapi dilihat dari realisasi sudah mengalami peningkatan terus menerus, meskipun belum mencapai target. Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah yang terus naik ini juga perlu diketahui bagaimana kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terus naik ini.

Besarnya keterlibatan sektor pariwisata terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang juga mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah, maka dalam penelitian ini peneliti membuat batasan untuk meneliti sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pendapatan dapat dikatakan bahwa berbentuk materi yaitu uang. Seberapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2012-2016 di setiap sektor pariwisata yang menarik peneliti untuk menelitinya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah adalah hal yang sangat penting karena dalam kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan petunjuk yang lebih baik, terarah, dan terdorong untuk mengetahui jawabannya. Menurut Arikunto (2002:22) agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-bainya, maka penelitian harus merumuskan masalahnya sehingga jelas darimana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa. Apabila suatu masalah dalam penelitian telah diperoleh, maka perlu ditentukan ruang lingkupnya. Ruang lingkup permasalahan dalam suatu penelitian sangat penting agar peneliti tidak terjerumus dalam pengumpulan data yang tidak relevan dalam proses mendapatkan data.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian rumusan masalah dari penelitian ini adalah “seberapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2013-2017 ?”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tujuan dari penelitian ini adalah terdeskripsikannya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2013-2017.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peneliti. Bagi peneliti sendiri guna menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat bersikap ilmiah dalam memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat khususnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.
2. Teoritis. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menambah penelitian-penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah, dan sebagai informasi terkini tentang Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pemerintah. Diharapkan dari hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai informasi dalam menentukan kebijakan dan program dalam meningkatkan PAD Kabupaten Jember khususnya sektor pariwisata.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi. Kajian teori dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap berikut:

1. mengumpulkan pendapat atau teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas;
2. membandingkan dan memilih teori yang paling relevan untuk memecahkan masalah;
3. membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori;
4. menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya.

Menurut Sanapiah Faisal (2005:263) pada bab dua tentang pembahasan kepustakaan (tinjauan pustaka) sangat bergantung pada topik masalah atau bangunan teori yang melandasi pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk menunjukkan konsep, teori, data, temuan-temuan yang bersangkutan-paut dengan masalah penelitian, sehingga masalah yang diteliti menjadi lebih jelas.

Pada penelitian ini, penelitian mencoba menunjukkan sejumlah konsep terkait masalah yang diteliti, sehingga penelitian ini semakin lebih jelas. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut.

1. Otonomi Daerah;
2. Kemandirian Keuangan Daerah;
3. Pendapatan Asli Daerah;
4. Kepariwisata;
5. Kontribusi Sektor Pariwisata;
6. Kerangka berpikir.

### 2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah semakin kuat sebagai akibat diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah penyempurna UU No. 12 Tahun 2008 penyempurna UU No. 32 Tahun 2004 penyempurna UU No. 22 Tahun 1999. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari seorang ahli menurut Widjaya (2011) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Darwin (2010) pilihan otonomi merupakan jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari kecenderungan sentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan yang terbukti tidak mendorong prakarsa, pengembangan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi setempat serta partisipasi masyarakat. Secara politis, otonomi ini merupakan upaya institusional guna mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah yang terus berlanjut. Secara ekonomi, dengan otonomi diharapkan akan menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumberdaya manusia dari daerah itu sendiri.

Konsekuensi dari otonomi daerah menurut Darwin (2010) pemerintah daerah kini dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya, dan di sisi lain pemerintah pusat tidak boleh lagi dominan dan menjadi faktor segala-galanya dalam pembangunan daerah, misalnya dalam menentukan jumlah dan alokasinya. Menurut Mahmudi (2010) tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*) yang ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah yang semakin responsif terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta meningkatnya demokratisasi di daerah. Menurut Widjaya (2011) tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

1. Menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menumbuhkan kemandirian daerah.
4. Meningkatkan daya saing daerah dalam proses pembangunan.

Penyerahan wewenang ini juga tidak terlepas dari keberhasilan desentralisasi sebagai perubahan dari sistem sentralisasi pemerintah yang membuat otonomi daerah berhubungan dengan desentralisasi. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi daerah dan desentralisasi memang berjalan dalam jalan yang sama, tetapi menurut Stewart dan Pide dalam Suwandi (2015) istilah otonomi daerah cenderung pada aspek politik tentang kekuasaan negara, sedangkan istilah desentralisasi cenderung pada aspek administrasi. Menurut Rondinilai dalam Suwandi (2015) desentralisasi adalah transfer wewenang dan tanggung jawab dalam fungsi-fungsi publik, dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintahan yang berada di bawahnya, yang kemudian dibagi menjadi empat kelompok yaitu dekonsentrasi, pendelegasian, devolusi, privatisasi.

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintahan pusat di daerah.
2. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.
3. Devolusi adalah pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah dalam bidang keuangan. Devolusi juga dapat diartikan pihak

pemerintah daerah mendapat diskresi yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah pusat.

4. Privatisasi adalah pelimpahan wewenang kepada organisasi non-pemerintah atau swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada organisasi tersebut untuk ambil bagian dalam proses pembangunan nasional.

Menurut Kaho dalam Darwin (2010) ada empat faktor mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yaitu manusia, keuangan, peralatan, organisasi dan manajemen.

1. Manusia

Faktor manusia adalah faktor paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia yang merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya yakni sesuai tujuan yang diharapkan, maka manusia sebagai pelaku atau subyek tersebut harus baik. Tanpa pelaksana yang baik maka mekanisme pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. pengertian baik tersebut meliputi mentalitas (moral) dan kecakapan kemampuan.

2. Keuangan

Faktor berikutnya adalah keuangan yang baik. istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang seperti pendapatan, jumlah uang, dan pengelolaan keuangan. Dalam setiap kegiatan pemerintahan faktor keuangan sangat penting karena hampir setiap kegiatan pemerintah membutuhkan biaya. Makin banyak kegiatan yang dilakukan maka makin besar biaya yang diperlukan dan apabila semakin baik pengelolaan keuangan maka semakin berdayagunalah pemakaian uang tersebut.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah, J. Wajong dengan mengutip pendapat D'Audifferet dalam Darwin (2010) sebagai berikut:

1. bahwa pengeendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada hari kemudian penduduk sederah, sehingga kebijaksanaan yang



ditempuh untuk melakukan kegiatan dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu;

2. bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak memberikan hasil yang memuaskan dan abadi tanpa cara pengendalian keuangan yang baik terlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijaksanaan, yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah dengan mana semua kepentingan masyarakat daerah dengan sangat erat berhubungan;
3. bahwa anggaran adalah alat utama untuk penegndalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdsarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang bijaksana.

### 3. Peralatan

Faktor yang ketiga adalah peralatan yang cukup baik. peralatan adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik dari segi kepraktisan, keefesienan, dan keefektifan jelas sangat dibutuhkan bagi terciptanya suatu pemerintahan daerah yang baik. Apalagi dalam era organisasi dan abad teknologi yang serba kompleks seperti saat ini, jelas bahwa peralatan yang praktis dan efisien sangat dibutuhkan. Peralatan-peralatan seperti ini juga sangat tergantung kepada kondisi keuangan maupun sumberdaya manusia yang mengoperasikannya.

### 4. Organisasi dan Manajemen

Faktor keempat yaitu organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi (The Lang Gie, 1968:185) merupakan suatu wadah yang menampung orang-orang dalam suatu kesatuan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beseta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedang manajemen (The Lang Gie, 1965:11) adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang ditentukan benar-benar tercapai.

Otonomi daerah dapat berjalan baik apabila organisasi dan manajemen yang melaksanakannya juga baik dan hal tersebut tergantung kepada kepala daerah beserta staf dalam menggerakkan peralatan yang ada seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tentang otonomi daerah tersebut jelas otonomi daerah merupakan sumber kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, termasuk dengan penerimaan yakni pendapatan.

### **2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah**

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Menurut Halim (2001:19) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku.

Halim (2002:19) menyatakan terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- a. yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah;
- b. yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “self supporting” dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2002) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu :

- 1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan
- 2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2008:232) Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Halim (2008) mengemukakan bahwa “Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk

mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio akan menunjukkan tingkat kesehatan semakin baik bila terus meningkat, akan tetapi perlu diperhatikan pula bila terjadi kenaikan secara kontinyu atas pendapatan bunga, karena hal tersebut dapat diartikan terdapat peningkatan dana pemda yang disimpan dalam bank dan tidak dibelanjakan (DJPK, 2011). Rasio kemandirian keuangan daerah ini apabila hasil semakin tinggi maka akan semakin kecil angka ketergantungan daerah terhadap pihak lain (pemerintah pusat khususnya) dan berlaku sebaliknya. Rasio kemandirian dapat pula untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

### 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan

asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Adapun sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, sebagai berikut.

1. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa,

menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak daerah kabupaten/kota dalam UU No 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 terdiri dari:

- a) pajak hotel;
- b) pajak restoran;
- c) pajak hiburan;
- d) pajak reklame;
- e) pajak penerangan jalan;
- f) pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g) pajak parkir;
- h) pajak air tanah;
- i) pajak sarang burung walet;
- j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Bab VI tentang Retribusi berdasarkan objek retribusi dibagi atas tiga golongan:

1. Retribusi Jasa Umum:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Retribusi Terminal;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Gangguan;

- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan pengertian, penjelasan, dan sumber tentang Pendapatan Asli Daerah memiliki dasar yang kuat dalam pengeloalaannya dan merupakan sumber terbesar pendapatan suatu daerah.

#### **2.1.4 Kepariwisataan**

Secara etimologi istilah pariwisata sendiri berasal dari Bahasa sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan tour, yang berarti berputar putar dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata “pariwisata” terdiri dari dua suku kata, yaitu “Pari” dan “Wisata”. “Pari”, berarti banyak, berkali-kali, berputar putar, lengkap. Kepariwisataan memiliki kata dasar wisata yang dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bab 1 pasal 1 terdapat banyak penjelasan yang menyangkut kata wisata sebagai berikut.

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.



6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pariwisata adalah sejumlah gejala dan hubungan yang timbul, mulai dari interaksi antara wisatawan di satu pihak, perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah, serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan dimaksud (MacIntosh dalam Yoeti, 2008:9). Menurut Spillane (1987) pariwisata terbagi atas beberapa jenis sbagai berikut:

1. pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*);
2. pariwisata untuk berekreasi (*recreation tourism*);
3. pariwisata untuk budaya (*culture tourism*);
4. pariwisata untuk olahraga (*sport tourism*);
5. pariwisata untuk urusan usaha dagang (*bussiness tourism*);
6. pariwisata untuk berkonvensi (*conventinal tourism*).

Menurut Pendit (1994), ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain sebagai berikut.

1. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka.
2. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.

3. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau Negara.
4. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
5. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
6. Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau laut.
7. Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
8. Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalan.

Menurut Suryadana dan Octavia (2015: 32-33) wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut.

a. Wisata Alam

1. Wisata Pantai (Marine tourism) merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
2. Wisata Etnik (Etnik tourism) merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.

3. Wisata Cagar Alam (Ecotourism) merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
  4. Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
  5. Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan.
- b. Wisata Sosial-Budaya
1. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monument, wisata ini termasuk golongan budaya, monument nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.
  2. Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu.

Dalam bidang kepariwisataan menurut Spillane (1994) terdapat tiga pemain utama dalam industri pariwisata, antara lain :

1. mereka yang mencari kepuasan atau kesejahteraan lewat perjalanan mereka (wisatawan atau tamu) (*guests*);
2. mereka yang tinggal dan berdomisili dalam masyarakat yang menjadi “alat” pariwisata (tuan rumah atau penduduk setempat) (*hosts*);
3. mereka yang mempromosikan dan menjadi perantaranya (bisnis pariwisata atau perantara) (*brokers*).

Tertuang dalam pasal 3 UU No. 10 Tahun 2009, bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 4, kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Menurut Jackson (dalam Gde Pitana, 2005: 101) suatu daerah yang berkembang menjadi sebuah destinasi wisata dipengaruhi oleh beberapa hal yang penting, seperti.

1. Menarik untuk klien.
2. Fasilitas-fasilitas dan atraksi.
3. Lokasi geografis.
4. Jalur transportasi.
5. Stabilitas politik.
6. Lingkungan yang sehat.
7. Tidak ada larangan/batasan pemerintah.

Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-barang cinderamata (Gde Pitana, 2005: 101). Salah satu yang menjadi suatu daya tarik terbesar pada suatu destinasi wisata adalah sebuah atraksi, baik itu berupa pertunjukan kesenian, rekreasi, atau penyajian suatu paket kebudayaan lokal yang khas dan dilestarikan. Atraksi dapat berupa keseluruhan aktifitas keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti belajar tari, bahasa, membuat, memainkan alat musik tradisional, membajak sawah, menanam padi, melihat kegiatan budaya masyarakat setempat, dan lain-lain (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011: 13).

Berdasarkan uraian tentang kepariwisataan di atas dapat diketahui bahwa kepariwisataan merupakan sesuatu yang besar pengaruhnya bagi pendapatan.

### **2.1.5 Kontribusi Sektor Pariwisata**

Pengertian kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan. Menurut Kamus Ilmiah Populer karya Dany H. (2006:264) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan." Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Yandianto (2000:282) kontribusi diartikan: "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan." Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira:2012). Peneliti menyimpulkan kontribusi dalam penelitian ini merupakan sumbangan baik dalam bentuk materi maupun non-materi yang akan menjadi bagian dari suatu hal dan berdampak nyata dan positif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sektor adalah salah satu kalimat yang artinya menunjukkan tempat atau wilayah sekitar ruang lingkup lingkungan kecil dari suatu wilayah. Sektor pariwisata merupakan sekumpulan unit produksi dalam industri berbeda yang menyediakan barang dan jasa khususnya dibutuhkan para pengunjung. Peneliti menyimpulkan bahwa sektor pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, yang menjadi kebutuhan dalam kegiatan kepariwisataan.

Sektor pariwisata yang ada di dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember berdasarkan yang ada di dalam Buku Database Informasi Pariwisata Kabupaten Jember tahun 2016, sebagai berikut.

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

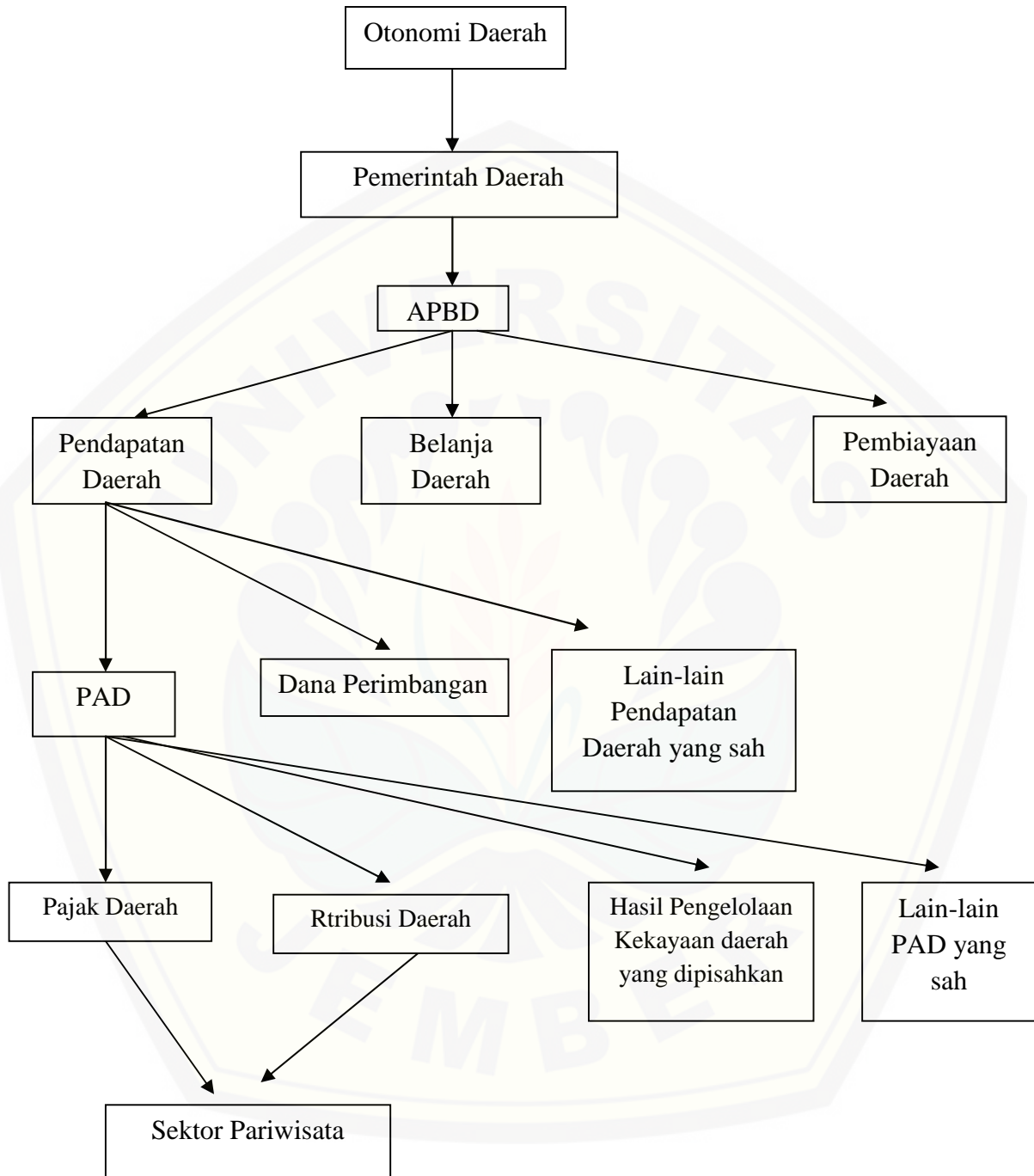
Berdasarkan pengertian dari kontribusi ini merupakan sebuah bentuk dorongan atau bagian yang memiliki pengaruh terhadap sebuah objek atau suatu hal. Dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pendapatan dapat dikatakan bahwa berbentuk materi yaitu uang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kebijakan Pengembangannya Di Kabupaten Jember	Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010
Tahun	2012	2012
Penulis	Desi Ulandari	Dhina Handayani
Lembaga	Universitas Negeri Jember	Universitas 11 Maret Surakarta
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapakah besar kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember ?</li> <li>2. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jember guna meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perkembangan pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi periode Tahun 2003-2010 ?</li> <li>2. Bagaimana kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi periode Tahun 2003-2010 ?</li> </ol>
Metode Penelitian	Kuantitatif Deskriptif	Kuantitatif Asosiatif
Hasil Penelitian	Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor basis yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi signifikan dari tahun ketahun. Dilihat dari hasil	Perkembangan pendapatan pariwisata menunjukkan kecenderungan meningkat. Penurunan kontribusi sektor pariwisata tersebut diakibatkan

	<p>analisis proporsi dari tahun 2002-2010, sektor ini mampu untuk menyumbang sebesar rata-rata 2,27 persen terhadap total PAD Kabupaten Jember. Untuk mengembangkan sektor pariwisata maka perlu dilakukan berbagai kebijakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember diantaranya meningkatkan promosi kepariwisataan, peningkatan manajemen pengelolaan, peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, peningkatan kemampuan margin ekonomi.</p>	<p>karena peningkatan pendapatan sektor pariwisata diimbangi pula dengan peningkatan jumlah PAD dari sektor-sektor lain yang lebih besar.</p>
Persamaan	Fokus penelitian, Lokasi penelitian	Konsep penelitian
Perbedaan	Waktu penelitian	Waktu penelitian Lokasi penelitian

2.3 Kerangka Berfikir





## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap realibel dan efisien karena pengetahuan ilmiah dan dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Menurut Usman dan Akbar (2009:41) metode adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Menurut Usman dan Abdi (2012:1) metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan penelitian.

Berdasarkan banyak pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Adapun cara penelitian yang dimaksud adalah kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, serta menyusun suatu laporan penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. pendekatan penelitian;
2. tempat dan waktu penelitian;
3. data dan sumber data;
4. teknik pengumpulan data;
5. teknik penyajian dan analisis data.

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Menurut buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan.

Penting bagi peneliti untuk menentukan jenis penelitian yang akan dipilih, di sini peneliti akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel yang lain ( Sugiyono, 2012:11). Menurut Arikunto (1990: 310) penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka Martono (2012). Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Menurut buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Tempat merupakan lokasi di mana peneliti akan melakukan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis. Penelitian ini tidak secara spesifik merujuk pada suatu tempat atau lokasi penelitian, tetapi Peneliti menetapkan dua lokasi sumber dokumentasi data penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Peneliti memilih lokasi Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian dengan berbagai alasan sebagai berikut.

1. Kabupaten Jember mendapatkan penghargaan Indonesia Attractive Award 2017 untuk eks Karesidenan Besuki dengan kategori kabupaten terbaik;
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum mencapai target RPJMD Kabupaten Jember;
3. Belum ada penelitian kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Jember di FISIP Unej.

Waktu merupakan masa di mana peneliti akan melangsungkan penelitian. Waktu penelitian akan dilakukan selama dua bulan.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data memiliki peranan penting dalam penulisan. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis, dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah terkait topik penelitian. Dalam buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016), data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Sumber data berasal dari organisasi, masyarakat, sistem, hewan, tumbuhan, bahan, alat, dan lain-lain. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik benda maupun orang. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen dan atau sumber informasi lainnya. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand information*". Sedangkan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber yang memberikan data langsung dari responden yang murni secara langsung. Data Primer ini berasal dari wawancara langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, narasumbernya adalah Kabid Pengembangan Produk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Bp. Dedi Mirarno, S.Pd dan Kabid Pembukuan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Ibu Indah.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang didapat secara tidak langsung, data yang dapat didapatkan misalnya melalui grafikserta dokumen-dokumen relevan yang dapat digunakan untuk mendukung. Data sekunder ini dapat diambil dari undang-

undang, peraturan-peraturan dan dasar hukum yang berkaitan dengan PAD, APBD, dan Pariwisata.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016), teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan alat sebagai berikut.

#### 1. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206), studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih kredibel bila didukung oleh dokumen seperti catatan, gambar, sketsa, dan lain-lain (Sugiyono, 2006:270).

Dokumen dan *record* digunakan untuk penelitian, menurut Guba dan Licoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008:159), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut.

1. Dokumen digunakan karena sumber yang lebih stabil, kaya, dan mendorong.
2. Berguna sebagai “bukti” untuk pengujian.
3. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang ilmiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
4. *Record* relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
5. Keduanya tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
6. Hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

## 2. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2012:219) wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya jawab lisan dengan informan yang diperlukan. Sedangkan menurut Moleong (2012) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

### 3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Data-data yang diperlukan telah diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis untuk mengetahui esensi dari data tersebut terkait masalah yang diteliti. Dalam buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016), teknik analisis dan analisis data adalah uraian tentang cara mengkaji mengolah dan mengolah data awal atau data mentah sehingga menjadi data atau informasi dan uraian cara analisisnya. Pada penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif peneliti menggunakan Analisis *Time Series* dan Analisis Perhitungan Proporsi.

#### 3.6.1 Analisis *Time Series*

Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya Statistik, analisa rangkaian waktu atau *time-series analysis* adalah analisa terhadap pengamatan, pencatatan, dan penyusunan peristiwa yang diambil dari waktu ke waktu tersebut. pada umumnya pengamatan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka-jangka waktu tertentu misalnya tiap-tiap akhir triwulan, tiap-tiap permulaan tahun, tiap-tiap sepuluh tahun dan sebagainya. Sebagai teknik dari statistik, analisa rangkaian waktu baru dapat dilakukan terhadap data yang sudah dikwantifikasikan atau diwujudkan dalam angka-angka.

#### 3.6.2 Analisis Proporsi

Menurut Purwanti dan Sulistyastuti (2007), perhitungan proporsi merupakan cara analisis yang paling sederhana membuat perbandingan kejadian suatu kasus dengan total kasus yang ada dengan dikalikan dengan nilai 100. Menurut Djarwanto (2001), untuk mengetahui besarnya proporsi atau kemampuan

dari sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD maka analisis proporsi dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{P}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan :

Z : Proporsi penerimaan sektor pariwisata terhadap PAD

P : Proporsi penerimaan sektor pariwisata

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini belum adanya teori maupun konsep yang khusus menjelaskan tentang sektor pariwisata. Selain itu pada Pendapatan Asli Daerah tidak ada penjelasan pengelompokkan sektor-sektor sebagai pendorong ekonomi masyarakat terhadap pendapatan daerah.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menyebabkan multitafsir dan merupakan pernyataan pernyataan akhir penalaran deduktif-induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Berdasarkan analisis dan pembahasan atas data yang terkumpul maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember bersumber pada Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Sektor pariwisata yang termasuk Pendapatan Asli Daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
3. Sektor Pariwisata tergolong memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan beberapa penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya, yakni dari penerimaan Pajak Reklame, Retribusi Pasar, BUMD, PPJ, Pajak Mineral Non-Logam, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan, dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
4. Terdeskripsikannya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi selama 5 tahun, pada tahun 2013 berkontribusi sebesar 3,79%, pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan berkontribusi sebesar 3,30%, pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan berkontribusi sebesar 3,34%, pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan berkontribusi sebesar 3,42%, pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan berkontribusi sebesar 2,89%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,79%, dan paling kecil di tahun 2017 sebesar 2,89%.
5. Sektor Pariwisata di Kabupaten Jember selain berpengaruh terhadap daerah yakni PAD juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat daerah. Pengaruh

terhadap perekonomian masyarakat daerah dapat dilihat berdasarkan jumlah lapangan usaha dan jumlah tenaga kerja sektor pariwisata. Jumlah hotel, restoran dan tempat hiburan mengalami fluktuatif selama 5 tahun. Jumlah hotel bertambah 10 tempat, jumlah restoran mengalami penurunan 10 tempat, dan jumlah tempat hiburan bertambah 11 tempat. Dan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata mengalami peningkatan setiap tahunnya yang artinya sektor pariwisata menyerap tenaga kerja dengan baik.

6. Penerimaan sektor pariwisata mengalami peningkatan yang baik selama 5 tahun, pada tahun 2013 penerimaan sebesar Rp11.677.361.350 sebesar di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp2.874.119.984 menjadi Rp14.551.481.334 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 24,61%, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp889.376.394 menjadi Rp15.440.857.728 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,11%, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp2.459.066.596 menjadi Rp17.899.924.324 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15,93%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp2.861.825.548 menjadi Rp20.761.749.872 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15,99%. Peningkatan dan perumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2014, dan terkecil pada tahun 2015.
7. Pajak restoran merupakan subsektor yang berkontribusi paling besar daripada subsektor lainnya yakni mencapai rata-rata lebih dari 50%, serta mencapai kontribusi paling besar daripada subsektor yang lain pada tahun 2017 sebesar 58,32%. Kontribusi terkecil adalah subsektor retribusi tempat khusus parkir yang tidak mencapai 1% selama 5 tahun dan cenderung mengalami penurunan selama 5 tahun, serta berkontribusi paling kecil diantara subsektor yang lain yakni hanya 0,49% di tahun 2017.
8. Urutan kontribusi subsektor pariwisata sebagai berikut.
  1. Pajak Restoran.
  2. Pajak Hotel.
  3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  4. Pajak Hiburan.
  5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan.



#### 6. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

9. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember mengalami peningkatan selama 5 tahun, pada tahun 2013 sebesar Rp 308.383.350.304,68 naik pada tahun 2014 sebesar Rp133.122.266.918 menjadi Rp441.505.617.223 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 43,17%, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp20.952.054.547 menjadi Rp462.457.671.770 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,75%, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp61.680.225.247 menjadi Rp524.137.897.01 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 13,34%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang paling besar sebesar Rp194.967.774.331 menjadi Rp719.105.671.348 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 37,20%.

#### 5.Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mempunyai beberapa saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai pengelola sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Jember yang diwenangkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, sebagai berikut.

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat bersikap ilmiah dalam memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat khususnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menambah penelitian-penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah, dan sebagai informasi terkini tentang Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Diharapkan dari hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai informasi dalam menentukan kebijakan dan program dalam meningkatkan PAD Kabupaten Jember khususnya sektor pariwisata.
4. Perlunya pengembangan fasilitas pariwisata untuk membuat wisatawan tertarik dan merasa lebih nyaman dengan melakukan studi banding terhadap pariwisata yang lebih baik.

5. Perlunya juga pembinaan terhadap warga yang membuka penginapan di rumah warga atau homestay, agar lebih terkelola. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat diharapkan dapat mendorong pendapatan daerah.
6. Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan subsektor pariwisata yang berkontribusi paling rendah terhadap PAD perlu adanya peningkatan bantuan dan adanya peningkatan fasilitas yang menunjang sektor pariwisata agar lebih meningkat.
7. Pemerintah Daerah harus lebih mengencarkan iklan dan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Jember, agar pariwisata yang ada di Jember lebih dikenal masyarakat luas, serta mampu menarik para investor untuk berinvestasi pada sektor pariwisata di Kabupaten Jember, agar pariwisata Jember dapat berkembang dengan lebih baik.
8. Kurangnya transparansi penerimaan pendapatan daerah ayng lebih terperinci, sehingga tidak diketahuinya sumber-sumber pendapatan yang belum termasuk ke dalam PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdi, dan Usman Rianse. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul, Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Abdul, Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, Halim. 2008. *Auditing (Dasar Dasar Audit Laporan Keuangan). Edisi Keempat*. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Ahira, Anne. 2012. *Pengertian Kontribusi*. Bandung : Kencana.
- Akbar, Purnomo Setiady dan Husaini Usman. 2012. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dani. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Djarwanto. 2001. *Statistik Non Parametrik*. Yogyakarta :BPFE-UGM.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta:Gava Media.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : Publikasi ILO.
- Handayani, Dhina. 2012. *Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010*. Jember: Universitas Jember.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pendit, I Nyoman, S. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pusdiklatwas BPKP. 2007. *Sistem Pengendalian Mnajemen*. Modul Diklat Pembentukan Auditor Pengendali Teknis
- Sillalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Revika Aditama.
- Spillane. 1987. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spillane, James. 1994. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suryadana, Liga dan Vanny Octavia. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Sleman:Deepublish.
- Ulandari, Desi. 2012. *Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kebijakan Pengembangannya di Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.
- Usman, H. dan Purnomo S. Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yandianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : M2S.

Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata : Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta :Penerbit Kompas.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perda Kabupaten Jember No. 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataaan.

Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Perda Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Daerah.

### **Lembaga**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. 2016. *Buku Database Informasi Pariwisata Kabupaten Jember*. Jember.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember : Jember University Press.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

BPS. 2016. *Jember dalam Angka*. Jember : BPS.

Bappeda. 2017. *Perubahan RPJMD 2016-2020*. Jember: Bappeda.

**Internet**

<https://kbbi.web.id>

<https://id.wikipedia.org>

<http://m.jatimtimes.com/baca/159178/20170927/205703/raih-attractive-award-jember-dan-banyuwangi-wakili-eks-karesidenan-besuki/>

[http://m.kbr.id/berita/092017/saga\\_jember\\_kota\\_karnaval\\_indonesia/92365.html](http://m.kbr.id/berita/092017/saga_jember_kota_karnaval_indonesia/92365.html)

[http://m.beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/269999/kantor\\_pariwisata\\_jember\\_jadi\\_bumd.html](http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/269999/kantor_pariwisata_jember_jadi_bumd.html)

<https://jemberkab.go.id/>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Laporan Realisasi Anggaran*.

[www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)

**LAMPIRAN**



**Lampiran 1. Pedoman Wawancara**

**PEDOMAN WAWANCARA 1**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBER**

Nama Narasumber	: Bp. Dedi Mirarno, S.Pd
Jenis Kelamin	: Pria
Umur	: -
Alamat	: Jember
Jabatan /Pekerjaan	: Kabid Pengembangan Produk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

**Daftar Pertanyaan !**

1. Siapa saja pengelola obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Jember ?



**PEDOMAN WAWANCARA 2**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG**

Nama Narasumber	: Indah
Jenis Kelamin	: Wanita
Umur	: -
Alamat	: Jember
Jabatan /Pekerjaan	: Kabid Pembukuan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah

**Daftar Pertanyaan !**

1. Bagaimana kontribusi pariwisata yang dikelola bukan dibawah Pemerintah Daerah ?

Lampiran 2. Perda Kabupaten Jember No. 3 tentang Pajak Daerah  
(Potongan)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Lampiran 3. Perda Kabupaten Jember No. 5 tentang Retribusi Jasa Usaha (Potongan)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331-330224, 334267, 337422, 333147 \* Faksimile 0331-339029  
Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 1748/UN25.1.2/SP/2018


Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:


No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Supranoto M.Si / NIP. 196102131988021001	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	DPU
2	Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si / NIP. 195607261989021001	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	DPA

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :  
Nama : Nina Ari Santi  
NIM : 140910201010  
Jurusan : Administrasi Negara  
Judul : KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBER

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 07 Mei 2018

  
Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

Tembusan :  
1. Kasubag. Pendidikan  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Peringgal 

Lampiran 5. Surat Ijn Penelitian dari Lemlit Unej

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 1398/UN25.3.1/LT/2018 13 April 2018  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jember  
Di  
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1348/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Nisa Ari Santi  
NIM : 140910201010  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Kalimantan V No.26 Sumbersari-Jember  
Judul Penelitian : "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember"  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pariwisata Kab. Jember  
2. Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember  
Lama Penelitian : 3 Bulan (5 April-30 Juli 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

  
Ketua  
Lemlit Unej II,  
Dr. Susanto, M.Pd.  
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth  
1. Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Jember,  
2. Kepala Rapenda Kab. Jember,  
3. Dekan FISIP Univ Jember,  
4. Mahasiswa ybs,  
5. Arsip.

  
CERTIFICATE NO. GMS/173

Lampiran 6. Surat Rekomendasi Penelitian dari Bangkesbangpol Jember

  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember  
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember  
di  
**JEMBER**

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072/1107/415/2018  
Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 13 April 2018 Nomor : 1398/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama / NIM. : Nina Ari Santi / 140910201010  
Instansi : FISIP Universitas Jember  
Alamat : Jl. Kalimantan V/26 Sumberson, Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul : "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember"  
Lokasi : 1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : April s/d Juli 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperfunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 18-04-2018  
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
  
NIP. 19610204198121001

Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua LPPM Universitas Jember;  
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 7. Daftar: Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2013-2017

No. 1

**DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013 SD TANGGAL 31 Desember 2013**

No.	KODE REVENUE	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SD BULAN LALU	JUMLAH POKOK/SH	JUMLAH SD BULAN INI	
1			3.375.874.250,188.00	2.224.843.902,828.00	111.827.037,824.88	2.336.379.829,825.88	69,49
2			303.845.079,814.00	279.487.184,387.00	27.338.159,817,68	306.385.350,304,68	101,48
3			86.081.000,000.00	84.783.834,901,85	10.224.209,808,00	85.188.144,459,88	110,58
4			1.200.000,000.00	1.279.713,490,00	543,24,794,90	2.177.241,285,90	180,98
5			1.200.000,000.00	1.279.713,490,00	12.879,783,00	2.177.241,285,90	180,98
6			4.500.000,000.00	3.150.349,378,79	600.209,811,00	6.100.859,847,79	136,90
7			3.800.000,000.00	3.185.349,278,29	289.209,811,00	6.100.859,847,79	136,90
8			425.000,000.00	832.519,118,50	52.152,109,00	719.271,387,50	169,30
9			425.000,000.00	832.519,118,50	93.272,709,00	719.271,387,50	169,30
10			4.100.000,000.00	3.879.400,538,00	262.050,778,00	6.141.451,316,00	149,79
11			4.100.000,000.00	3.879.400,538,00	262.050,778,00	6.141.451,316,00	149,79
12			24.200.000,000.00	34.994.078,129,50	27.240,913,00	38.218.190,088,50	113,20
13			150.000,000.00	132.203,860,00	38.354,937,00	180.618,403,00	122,74
14			34.360.000,000.00	35.147.337,837,00	2.797.448,492,00	38.604.783,493,00	113,28
15			81.000,000.00	83.549,390,00	34.838,700,00	98.029,490,00	120,99
16			81.000,000.00	83.549,390,00	14.858,100,00	98.029,490,00	120,99
17			360.000,000.00	313.751,967,00	28.847,978,00	353.899,543,00	101,60
18			380.000,000.00	313.751,967,00	28.847,978,00	353.899,543,00	101,60
19			325.000,000.00	302.894,553,00	45.878,127,00	438.772,680,00	135,01
20			325.000,000.00	302.894,553,00	45.878,127,00	438.772,680,00	135,01
21			29.000,000,000.00	22.404,653,328,01	3.260,656,920,00	25.665,310,278,01	88,57
22			29.000,000,000.00	22.404,653,328,01	3.260,656,920,00	25.665,310,278,01	88,57
23			11.500.000,000.00	12.791,581,735,25	1.813,723,600,00	14.564,735,335,25	126,65
24			11.500.000,000.00	12.791,581,735,25	1.813,723,600,00	14.564,735,335,25	126,65

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN Jember  
 Jl. Jember No. 72 Jember Telp. (0321) 321172 Fax. (0321) 34884